



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 12 September 2022
Waktu	: Pukul 16.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Laporan Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 (dua puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 25 (dua puluh lima) Anggota Panja Komisi II DPR RI; B. DPD RI; C. Kementerian Dalam Negeri RI; D. Kementerian Keuangan RI; E. Kementerian PPN/Bappenas RI; dan F. Kementerian Hukum dan HAM RI.

I. **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda laporan Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya, pada hari Senin, 12 September 2022, dibuka pukul 16.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda laporan Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya, sebagai berikut:

Panitia Kerja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:

1. Kunjungan kerja ke Kota Sorong Provinsi Papua Barat, tanggal 25 – 27 Agustus 2022, untuk mendapatkan masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dari Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat, DPR Provinsi Papua Barat, Bupati dan Walikota serta DPRD Kabupaten/Kota dalam cakupan wilayah calon Provinsi Papua Barat Daya, Tim Pembentukan calon Provinsi Papua Barat Daya, Pangdam XVIII Kasuari, Kapolda Papua Barat, Kajati Papua Barat, Ormas, OKP dan tokoh Agama dan tokoh masyarakat.
2. Rapat Kerja Tk. I, tanggal 29 Agustus 2022, dengan agenda penjelasan/keterangan DPR RI, pandangan Pemerintah, pandangan Komite I DPD RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta pembentukan Panja.
3. Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya, tanggal 30 Agustus 2022, dengan agenda rapat adalah pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait pasal-pasal yang bersifat substantif erhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan dan 3 (tiga) isu Pokok penting yakni **Pertama**, terkait dengan Cakupan Wilayah Calon Provinsi Papua Barat Daya,, **Kedua**, terkait dengan Ibu kota Calon Provinsi Papua Barat Daya dan **Ketiga**, terkait dengan aspirasi permasalahan 4 (empat) distrik induk yakni Senopi, Kebar, Muhrani dan Ambebaken dan 7 (tujuh) distrik pemekaran wilayah ex Kabupaten Manokwari tanah adat Arfak untuk dikeluarkan dari Kabupaten Tambrauw dan tidak ditetapkan menjadi bagian dalam wilayah DOB Papua Barat Daya.

4. Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, tanggal 31 Agustus 2022, dengan agenda merumuskan dan mensinkronkan serta menyempurnakan beberapa DIM yang terdapat dalam RUU tentang Provinsi Papua Barat Daya sesuai yang ditugaskan oleh Panja. Selain itu Tim Perumus/Tim Sinkronisasi juga menyelesaikan pembahasan beberapa isu Pokok yang menjadi agenda Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang sangat substantif untuk disetujui secara bersama ditingkat Panja.
5. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan Pejabat Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat serta para Bupati, tanggal 5 September 2022, dengan agenda menerima aspirasi terkait terhadap pembahasan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
6. Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, pada tanggal 5 September 2022, dengan agenda **laporan hasil pembahasan di tingkat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi**, dan selanjutnya disepakati oleh Panja menjadi keputusan bersama untuk diselenggarakan dan disinkronkan dalam draft akhir RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilaporkan kepada Raker Tingkat I Komisi II DPR RI.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, dengan agenda laporan Panja Pembahasan RUU tentang Pembentukan Papua Barat Daya, sebagai berikut:

Panja RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II DPR RI bersama DPD RI dan Pemerintah menyepakati beberapa hal, sebagai berikut:

1. Nama Calon Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Kota Sorong.

2. Cakupan wilayah Kabupaten/Kota di dalam RUU pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, yakni sebagai berikut:

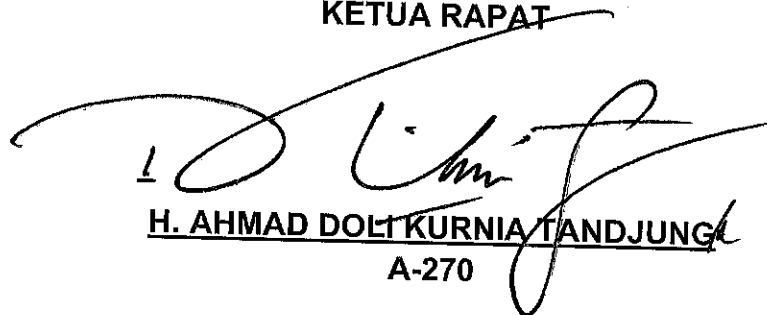
- 1) Kabupaten Sorong
- 2) Kabupaten Sorong Selatan
- 3) Kabupaten Raja Ampat
- 4) Kabupaten Tambrauw
- 5) Kabupaten Maybrat; dan
- 6) Kota Sorong

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.46 WIB.

Jakarta, 12 September 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270